



PUNGLI KINTAMANI

Dewan Nilai Kebocoran PAD Tinggi

BANGLI - Pasca beredarnya video yang membuat heboh terkait pungli tiket masuk di wisata Kintamani beberapa hari lalu, membuat Dewan Bangli curiga dengan adanya kebocoran dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pariwisata membengkak. Bahkan nilai kerugian tersebut ditaksir mencapai 50 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Bangli Ngakan Kuta Parwatha saat ditemui pada, Selasa (22/9) kemarin.

Terkait hal ini, pihaknya sangat menyayangkan adanya praktik nakal dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Bahkan kejadian ini telah mencoreng citra pariwisata Bali khususnya Bangli. Lebih dipastikan jika praktik ini sudah lama berjalan, pasalnya pada Februari lalu pihaknya juga sempat melakukan sidak dari beberapa mini bus yang hendak memasuki kawasan wisata Kintamani. "Salah satu bus yang mangangkut 27 wisatawan, namun yang memegang tiket masuk hanya 23 orang. Dan lebih parah lagi pada bus berikutnya yang mengangkut 29 penumpang dan semuanya tidak memiliki tiket," ujarnya.

Lebih lanjut Kutha mengatakan jika harga satuan tiket yakni Rp 30.000 untuk satu orang. Praktik tersebut diduga kuat hampir setiap hari terjadi. Diperkirakan jika tingkat kebocorannya mencapai 50 persen yang dapat merugikan PAD. (zul/gup)

Edisi : Rabu, 23 spt 2015

Hal : 25



Rapat Kerja Molor 2,5 Jam

Gara-gara Pergeseran Hibah untuk Kegiatan

AMLAPURA - Rapat kerja DPRD Karangasem, dengan eksekutif yang digelar di gedung DPRD Karangasem, Selasa (22/9), molor sekitar 2,5 jam. Pihak eksekutif sudah berada di ruang rapat lantai II sejak sekitar pukul 10.15. Mereka sudah siap rapat kerja membahas rancangan Perubahan APBD 2015.

Hanya saja, setelah hampir satu jam menunggu di ruang rapat, tak satupun ada anggota dewan masuk ruangan rapat. Sejumlah anggota DPRD

malah asykn gobrol di ruangan masing-masing di lantai I.

Sehingga, satu per satu, eksekutif yang didominasi kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ini, pun keluar ruang, dengan berbagai alasan. "Ngapaen juga di dalam, rapat *gak* mulai, hanya akan kedinginan kena AC (Air Conditioner)," celetuk salah seorang kepala SKPD.

Lantaran hingga jadwal makan siang, sekitar pukul 11.30, belum juga ada tanda-tanda rapat dimulai, akhirnya pimpinan SKPD ini, dipersilahkan istirahat makan siang, sebelum rapat kerja dimulai. Pantauan koran ini, rapat

kerja yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, itu dimulai sekitar pukul 12.45. Lucunya, setelah semua memasuki ruangan tanda rapat kerja dimulai, palu Ketua DPRD ternyata tak ada di mejanya, sehingga harus menunggu beberapa menit.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Karangasem, I Wayan Ardika, mengakui, rapat kerja molor dari jadwal. Karena, sebelum rapat terbuka di ruang kerja dimulai, ternyata unsur pimpinan DPRD Karangasem, seperti Ketua DPRD beserta wakilnya, sudah melakukan rapat tertutup dengan pimpinan eksekutif, yakni Sek-

da Karangasem I Gede Adnya Mulyadi, dan Kepala Bappeda Karangasem, I Ketut Sedana Merta. Mereka membahas pergeseran anggaran hibah dan bansos pasca berlakunya Undang-undang 23/2014 tentang Pemerintahan Desa, yang mensyaratkan penerima hibah wajib berbadan hukum Indonesia. Lantaran banyak proposal tidak berbadan hukum, maka tidak bisa mendapatkan hibah, sehingga uang itu digeser untuk anggaran kegiatan. "Masih mencocokkan data di unsur pimpinan, supaya tidak ada tumpang tindih. Selain itu, ada beberapa teman-teman dinas yang membawa data

telat datang, jadinya molor," jelas Ardika.

Salah seorang anggota DPRD Karangasem, I Wayan Sunarta mengingatkan, penggeseran anggaran hibah uang dan barang menjadi kegiatan pada Perubahan APBD 2015, mesti memperhatikan asas keadilan dan pemerataan di masing-masing kecamatan. Serta mempertimbangkan waktu. "Kalau memang waktu tidak cukup untuk menyelesaikan kegiatan, lebih baik jangan dilakukan, ketimbang bermasalah," saran Sunarta, seraya menyebutkan hibah yang digeser itu mencapai Rp 20 miliar. (wan/gup)

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 25